

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan dengan tiga per empat wilayahnya berupa lautan, Indonesia memiliki potensi *Marine Mega Biodiversity* yang menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia diantaranya adalah sumber daya yang sifatnya terbarukan seperti perikanan, terumbu karang dan ekosistem mangrove serta sumber daya yang sifatnya tak terbarukan berupa gas, minyak bumi, dan mineral lainnya (Anggoro et al., 2019; Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2022; Tulungen et al., 2003). Hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bermukim sekaligus mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis kelautan. Sekitar 60% penduduk Indonesia kini menempati kurang lebih 300 kabupaten/kota pesisir dalam radius 50 km dari garis pantai (Anggoro et al., 2019; Rudiarto et al., 2018). Fenomena ini semakin diperkuat dengan adanya arus urbanisasi yang mendorong pertumbuhan dan transformasi kota-kota pesisir menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan jasa. Transformasi perkotaan membuktikan bahwa sifat kota adalah dinamis dan berkaitan erat dengan dinamika demografi, yang mendorong perluasan kawasan dan perubahan struktur ruang kota (Mega, 2010; Rukmana and Shofwan, 2020).

Kawasan pesisir merupakan salah satu ruang yang paling rentan terhadap dinamika sistem sosial-ekologis perkotaan. Keberadaannya pada transisi antara dua sistem ekologis—darat dan laut—menciptakan kompleksitas sistem yang tinggi. Laju kenaikan muka air laut sebesar 0,48 cm tiap tahunnya menunjukkan bahwa kawasan pesisir adalah lingkungan dinamis yang terbentuk dari interaksi terus menerus antara daratan dan lautan melalui proses erosi dan akresi sedimen (Pontee, 2013; United Nations, 2024). Dinamika lingkungan tersebut membentuk *feedback mechanism* dengan struktur sosial-ekonomi, kebijakan perkotaan, livelihood serta cara ruang urban—yang terdiri dari berbagai ritme—diproduksi dan dikendalikan (Gunderson & Holling, 2002; Lefebvre, 2013; Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991; Scoones, 2015). Kondisi ini menegaskan bahwa kawasan pesisir kota tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai sistem yang saling terkait dan memerlukan pendekatan perencanaan dan perancangan yang mampu merespons perubahan sosio-ekologis.

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang terletak di pesisir Indonesia. Secara geografis, sebelah utara wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan garis pantai yang membentang sepanjang $\pm 13,6$ km. Total populasinya mencapai 1.708.833 dengan 16 kecamatan dan sekitar 25,7% populasi berada di 4 kecamatan yang berbatasan langsung dengan pesisir (Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk) (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025). Kawasan pesisir Kota Semarang masuk ke dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) III, IV dan X dengan fungsi utama sebagai pusat transportasi laut, perdagangan barang/jasa dan industri. Fungsi ini ditandai dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara sebagai pelabuhan terbesar di Jawa tengah yang telah digunakan sejak masa kolonial hingga sekarang (Anditasari, 2023; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, 2021). Dominasi ini berpotensi menekan keberlanjutan kawasan, dengan kondisi Kota Semarang sebagai kota kedua di dunia yang terancam tenggelam (P. C. Wu et al., 2022). Selain itu, dominasi kawasan tersebut juga memicu konflik pemanfaatan ruang antara orientasi ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Hal ini juga semakin menggeser *livelihood* masyarakat pesisir yang bergantung pada laut terutama nelayan (Mustofa, 2023; Prayogy, 2025).

Kampung nelayan merupakan suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan sehingga memiliki keterikatan erat dengan laut (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kampung Nelayan Maju, 2022a). Keterhubungan dengan laut tidak hanya bersifat ekonomi saja, tetapi terwujud dalam praktik spasial sehari-hari, pola bermukim dan konfigurasi ruang yang tumbuh secara adaptif (Dovey et al., 2021; Iskandar et al., 2022). Kampung nelayan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan kompleks meliputi tingginya kepadatan penduduk, keterbatasan jumlah dan kualitas infrastruktur permukiman, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya tingkat kesehatan dan produktivitas masyarakat nelayan, sehingga berdampak pada keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi di kawasan pesisir¹ (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik

¹ Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai nelayan Tambaklorok, Semarang, 29 Oktober 2025

Indonesia, 2019). Hal ini menunjukkan rendahnya kapasitas adaptif—komponen penting yang berperan sebagai penghubung antara kerentanan dan resiliensi—kampung nelayan pesisir (Cinner et al., 2018; Gunderson & Holling, 2002).

Kampung Tambaklorok adalah kampung nelayan terbesar di Kota Semarang yang menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat tekanan pembangunan perkotaan di wilayah pesisir. Kondisi fisik dan struktur sosial-ekonomi masyarakat berubah akibat dibangunnya pabrik-pabrik besar di pesisir Kota Semarang. Tingkat penurunan muka tanah di wilayah ini relatif besar, yakni sekitar $7,39 \pm 2,95$ cm setiap tahunnya dan berdampak pada tergenangnya rumah penduduk oleh banjir rob (Jundi et al., 2017). Kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu wilayah kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Semarang No. 050/801/2014, yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan program penataan lingkungan dan perumahan (Dimitra & Yuliasuti, 2012). Pada tahun 2015, pembangunan tanggul laut dilaksanakan sebagai langkah awal intervensi pemerintah melalui program “Kampung Bahari” (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana, 2015; Ningtyas & Ikhwanudin, 2023). Dengan rencana mempertemukan strategi *top-down* dengan adaptasi *bottom-up*, Program Kampung Bahari diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan Kampung Tambaklorok.

Strategi *top-down* berupa intervensi fisik *hard-infrastructure* terbukti mampu menunjukkan efektivitas jangka pendek dalam mereduksi dampak banjir rob dan memperbaiki kondisi lingkungan permukiman¹. Sejumlah studi mengenai penataan permukiman pesisir yang terdegradasi dan wawancara dengan beberapa warga Tambaklorok menunjukkan bahwa intervensi *top-down* termasuk *hard-infrastructure* cenderung menghasilkan peningkatan ketahanan fisik namun tidak selalu diiringi oleh penguatan kapasitas adaptif sosio-ekologis kawasan² (Angnuureng et al., 2023; Arnall, 2023; Cajilig, 2024; Mamo et al., 2018; Yamashita, 2020). Pendekatan bersifat *top-down* yang masif menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak institusional dan menggerus ruang bagi praktik adaptasi yang sebelumnya tumbuh secara organik dari pengalaman hidup masyarakat nelayan³ (Angnuureng et al., 2023; Esteban et al., 2020; Yamashita, 2020). Kondisi ini memunculkan paradox pembangunan Tambaklorok sebagai kawasan pesisir kota: dalam kondisi seperti apakah penataan kawasan Tambaklorok dapat memperkuat ketahanan fisik lingkungan sekaligus mempertahankan praktik adaptasi masyarakat nelayan ditengah ancaman tenggelamnya kawasan? Pertanyaan ini menandai adanya kesenjangan antara pendekatan penataan kawasan yang bersifat *top-down* dengan dinamika adaptasi lokal Tambaklorok yang berkembang secara organik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan redesain berbasis Sistem Sosio–Ekologis (SES) yang memaknai keseluruhan kawasan sebagai satu kesatuan sistem adaptif yang kontinu. Fokus penataan diarahkan pada RW 16 Kampung Tambaklorok yang merupakan salah satu area dengan tingkat kerentanan lingkungan paling tinggi akibat banjir rob, penurunan muka tanah, serta kepadatan permukiman yang tinggi, sehingga memerlukan strategi penataan kawasan yang mampu memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat nelayan.

¹ Wawancara dengan Bapak Mas'hur sebagai Ketua Kelompok Nelayan Tambaklorok dan Ibu Azizah sebagai Pendiri Kelompok Wanita Tani Tambaklorok, Semarang, 29 Oktober 2025.

² Wawancara dengan Bapak Widodo sebagai Nelayan Tambaklorok, Semarang, 29 Oktober 2025.

³ Wawancara dengan salah satu warga Tambaklorok, Semarang 07 Februari 2026.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Redesain Kawasan Kampung Bahari Tambaklorok menggunakan pendekatan Sistem Sosio-Ekologis (SES) guna menyeimbangkan ketahanan fisik dan praktik adaptasi masyarakat sehingga tercipta keberlanjutan kawasan dalam jangka panjang.

1.2.2. Sasaran

Mengidentifikasi permasalahan sosial, ekonomi, ekologis dan spasial kawasan, merumuskan strategi adaptasi terhadap banjir rob dan penurunan muka tanah, mengintegrasikan kebutuhan *livelihood* masyarakat nelayan dalam desain kawasan, menghasilkan konsep desain yang mendukung kapasitas adaptif masyarakat.

1.3. Manfaat

1.3.1. Subjektif

Manfaat dari penyusunan proposal “Redesain Kampung Bahari Tambaklorok Berbasis Sistem Sosio-Ekologis(SES) Kawasan” secara subjektif yaitu sebagai bagian dari persyaratan penyusunan Tugas Akhir Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Periode 162.

1.3.2. Obyektif

Manfaat dari penyusunan proposal “Redesain Kampung Bahari Tambaklorok Berbasis Sistem Sosio-Ekologis(SES) Kawasan” secara objektif yaitu untuk memperluas kajian mengenai Tambaklorok sebagai sistem sosio-ekologis yang dinamis serta menyusun konsep redesign Kampung Bahari Tambaklorok yang mampu merespon sistem dan mengakomodasikan praktik adaptasi spasial masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Substansial

Ruang lingkup substansial mencakup segala hal yang berhubungan dengan bagaimana *feedback-mechanism* sistem dan antar sistem di Tambaklorok sebagai dasar analisis dan penentuan redesign kawasan.

1.4.2. Spasial

Ruang lingkup spasial berada di kawasan Kampung Bahari Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

1.5. Metode Pembahasan

1.5.1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan fenomena yang ditemukan di lapangan secara sistematis berdasarkan data faktual dengan tujuan untuk memaparkan kondisi eksisting. Data yang akan dianalisis, diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan, serta studi literatur.

1.5.2. Metode Dokumentatif

Metode dokumentatif digunakan untuk memperoleh data pendukung berbentuk visual melalui *big data* maupun survei langsung.

1.5.3. Metode Komparatif

Metode komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kondisi, objek dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tipologi serta menjadi dasar dalam perumusan strategi dan konsep perancangan.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Manfaat Subjektif dan Objektif, Ruang Lingkup Substansial dan Spasial, Metode Pembahasan, Sistematika Pembahasan dan Alur Pikir dari Redesain Kampung Bahari Tambaklorok Berbasis Sistem Sosio-Ekologis (SES) Kawasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi Tinjauan Umum, Tinjauan Pendekatan, Studi Banding dan Sintesis Tinjauan Pustaka.

BAB III TINJAUAN LOKASI

Bab III berisi Tinjauan Umum Kawasan dan Kebijakan Tata Ruang Wilayah.

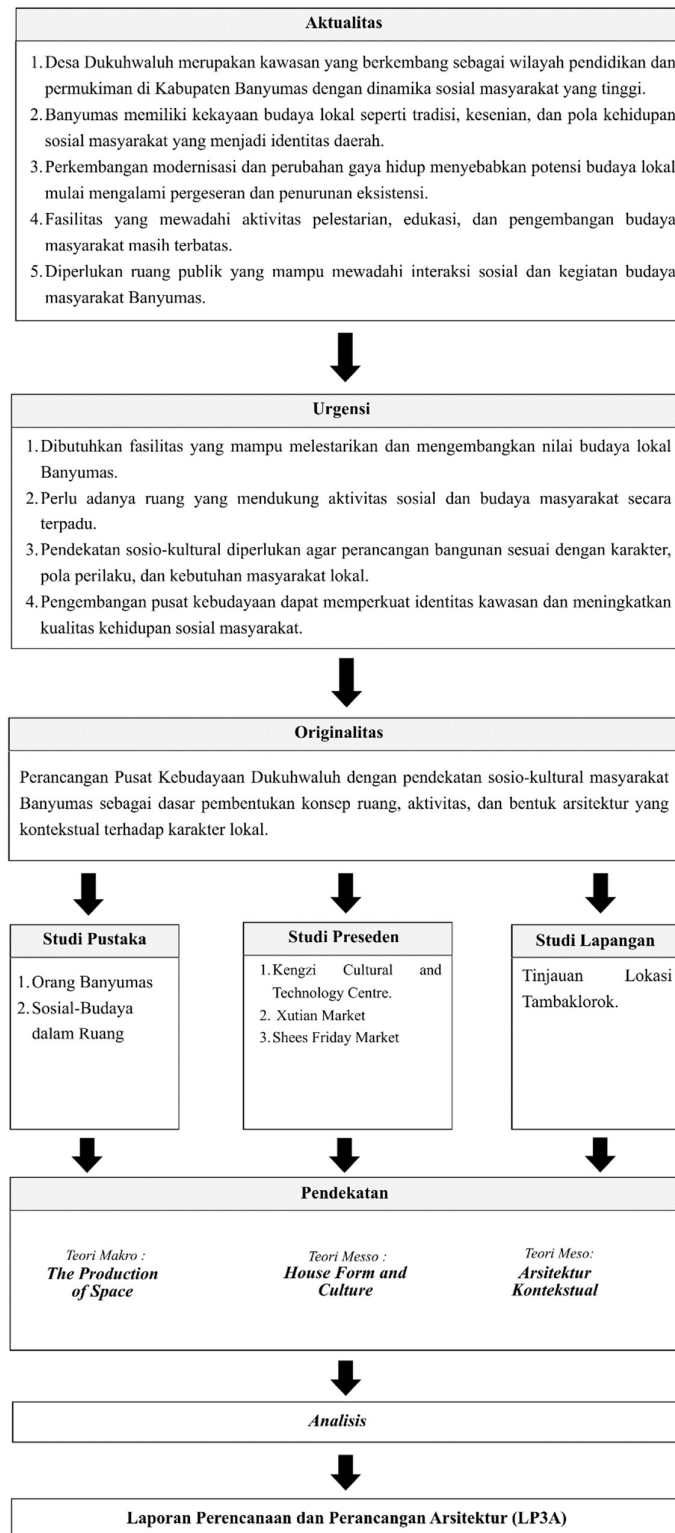
BAB VI PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Bab IV berisi Pendekatan Program Ruang, Aspek Kinerja, Aspek Teknis, Aspek Struktur dan Aspek Visual Arsitektural

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Bab V berisi Program Ruang, Aspek Kinerja, Aspek Teknis, Aspek Struktur dan Aspek Visual Arsitektural.

1.7. Alur Pikir



Gambar 1. Alur Pikir